

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertambangan merupakan salah satu pilar strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena berperan besar dalam penyediaan devisa, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur daerah. Indonesia dikenal sebagai negara kaya sumber daya alam memiliki cadangan mineral yang melimpah, khususnya nikel yang menjadi komoditas penting dalam transisi energi hijau dunia (Purba et al. 2025). Dalam konteks global yang menuntut energi berkelanjutan dan teknologi ramah lingkungan, keberadaan industri pertambangan terutama nikel menjadi sangat vital bagi ketahanan ekonomi dan energi nasional. Namun demikian, urgensi pertambangan juga membawa konsekuensi terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial di wilayah operasional tambang, sehingga dibutuhkan tata kelola yang berimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi (Ikhsan, Ariusni, and Putri 2019).

Pesatnya arus globalisasi pada isu keberlanjutan (*sustainability*) telah menjadi agenda utama dalam pembangunan global (I Komang Bayu Arta Jaya and I Putu Hendra Martadinata 2024). Paradigma lama menempatkan perusahaan tambang semata-mata sebagai entitas pencetak keuntungan ekonomi mulai berubah menuju paradigma baru yang menuntut keseimbangan antara keuntungan finansial dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif aktivitas ekonomi yang tidak terkendali,

seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, hingga lemahnya akuntabilitas tata kelola perusahaan (Fety Widianti Aptasari and Muhammad Helmi Falah 2025).

Pemerintah Indonesia melalui regulasi terkait sektor pertambangan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan asas keberlanjutan, keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas. Selain itu, peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tambang sebagai bagian dari tata kelola yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rahimallah, Pratiwi, and Kusmin 2021) terkait kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik *good mining governance*, yaitu pengelolaan pertambangan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang transparan serta partisipatif.

PT Vale Indonesia Tbk adalah salah satu pelaku utama dalam industri nikel nasional yang beroperasi di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Sejak awal berdiri pada tahun 1968, perusahaan ini memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Dalam praktiknya, PT Vale berupaya menyeimbangkan kegiatan eksploitasi sumber daya alam dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional, khususnya di Sorowako, Sulawesi Selatan (PT Vale Indonesia Tbk 2024). Salah satu upaya untuk

mewujudkan perusahaan yang berkelanjutan adalah menerapkan prinsip ESG, perusahaan berusaha menjaga efisiensi energi, mengelola limbah tambang, serta melibatkan masyarakat lokal dalam program tanggung jawab sosial (CSR) yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (Agung Hardiyanto et al. 2023). Namun, pelaksanaan prinsip ESG masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti isu lingkungan pada pengelolaan limbah, ketimpangan manfaat ekonomi antara perusahaan dan masyarakat, kurangnya transparansi informasi publik, serta minimnya koordinasi antar *stakeholder* dalam perencanaan dan evaluasi program keberlanjutan.

Pada tahun 2024 PT Vale menghadapi tantangan krusial dalam aktivitas kinerja lingkungan dengan capaian yang belum mencapai target bahkan menghadapi penurunan sesuai dengan tujuan keberlanjutan perusahaan diantaranya pada peningkatan emisi dan konsumsi energi, kenaikan volume limbah B3, dan menurunnya realisasi reklamasi (PT Vale Indonesia Tbk 2024). Penurunan ini menunjukkan belum optimalnya pemulihan ekosistem pascatambang yang dapat berakibat pada kehidupan masyarakat lingkaran tambang pada akses kehidupan lingkungan yang terbatas dan tidak berkelanjutan (Pabean, Sudirman, and Pertiwi 2025).

Meskipun PT Vale Indonesia Tbk telah menerapkan prinsip ESG, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi sejumlah persoalan yang kompleks. Dari aspek lingkungan (*environmental*), perusahaan masih dihadapkan pada isu degradasi lahan pascatambang, pengelolaan tailing, dan tekanan publik terkait

emisi karbon serta penggunaan air dalam proses produksi. Secara sosial (*social*), muncul ketimpangan persepsi antara masyarakat lokal dengan perusahaan mengenai distribusi manfaat ekonomi, transparansi program CSR, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Muhammad, Radjab, and Muhammad 2018). Secara sosial, relasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal masih didominasi oleh pendekatan top-down, di mana partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan lingkungan masih minim (Putri and Bayangkara 2025). Akibatnya, muncul ketegangan sosial dan *distrust* antara masyarakat dan pihak perusahaan, yang memicu protes terhadap kebijakan operasional tambang maupun distribusi manfaat ekonomi.

Sedangkan pada dimensi tata kelola (*governance*), tantangan utama terletak pada rendahnya koordinasi lintas aktor, lemahnya mekanisme akuntabilitas, dan belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dalam mewujudkan pengawasan tambang yang berintegritas dan partisipatif (Juliati, Yulia, and Sulfahmi 2023). Ketidakseimbangan ini mengakibatkan pelaksanaan prinsip keberlanjutan tidak berjalan secara partisipatif dan berkeadilan. Padahal, jika mengacu pada konsep *Collaborative Governance*, sinergi antara tiga aktor utama pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan eksploitasi sumber daya alam berjalan selaras dengan keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal (Ningsih, Yulianingrum, and Relyza 2025).

Permasalahan terkait lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan pada wilayah tambang PT. Vale menciptakan tekanan sosial yang signifikan mulai dari meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan maupun pemerintah hingga potensi konflik sosial yang menghambat keberlanjutan operasional (Fitrianti, Rahmanto, and Sudarmo 2025). Sejalan dengan penelitian (Boiral, Brotherton, and Talbot 2025) kondisi ini menandakan bahwa meskipun ada komitmen terhadap prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*), pelaksanaan aspek sosialnya belum sepenuhnya terintegrasi dan partisipatif, sehingga menuntut penguatan mekanisme kolaborasi antar-aktor untuk menyelesaikan permasalahan secara berkeadilan dan efektif.

Konsep *Collaborative Governance* kemudian menjadi model tata kelola alternatif yang relevan untuk memperkuat implementasi ESG, khususnya dalam sektor pertambangan yang melibatkan banyak kepentingan. (Ansell and Gash 2008) menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* adalah suatu proses dan struktur pengambilan keputusan publik yang melibatkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama. Dalam praktiknya, model ini menuntut adanya komunikasi yang intensif, kepercayaan timbal balik, serta komitmen bersama dalam mengatasi persoalan kompleks seperti pengelolaan lingkungan dan konflik sosial. Melalui pendekatan kolaboratif sejalan dengan penelitian (Trisniati et al. 2022), diharapkan pelaksanaan ESG di PT Vale Indonesia Tbk dapat lebih efektif, karena kebijakan dan

program yang dijalankan tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, tetapi juga hasil konsensus bersama dengan para pihak terkait.

Partisipasi pemangku kepentingan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas *governance* perusahaan. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta masyarakat lokal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program ESG merupakan bentuk nyata dari tata kelola yang kolaboratif (Holqi and Salam 2024). Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa partisipasi stakeholder di sektor pertambangan sering kali masih terbatas pada tahap konsultasi formal dan belum menyentuh proses pengambilan keputusan substantif (Durlista and Wahyudi 2023). Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan perusahaan dengan kebutuhan riil masyarakat, yang pada akhirnya menghambat efektivitas implementasi ESG.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara sektoral, studi ini berupaya melihat bagaimana kolaborasi antar pemangku kepentingan pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dapat menciptakan tata kelola tambang yang lebih partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi penting karena pelaksanaan ESG yang efektif tidak hanya bergantung pada kebijakan korporasi, tetapi juga pada sinergi antaraktor dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan di wilayah tambang seperti Sorowako. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat model tata kelola kolaboratif yang relevan bagi sektor pertambangan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul penelitian “*Collaborative Governance* dalam pelaksanaan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) PT. Vale Indonesia Tbk.”

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilandasi oleh pentingnya pelaksanaan prinsip kerja dan manajemen yang tidak hanya melibatkan perusahaan, tetapi juga partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan secara kolaboratif dan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar wilayah tambang. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan *Environmental, Social and Governance* PT. Vale Indonesia Tbk.
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan *Environmental, Social and Governance* PT. Vale Indonesia Tbk.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan *Environmental, Social and Governance* PT. Vale Indonesia Tbk.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Environmental, Social and Governance* PT. Vale Indonesia Tbk.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis.

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengkajian keilmuan dalam bidang ilmu pemerintahan dengan mengaplikasikan konsep *Collaborative Governance* dalam konteks penerapan sistem tata kelola perusahaan. Selama ini, studi kajian terkait *Collaborative Governance* di Indonesia mayoritas membahas dalam konteks pelayanan publik pada perkantoran, sehingga penelitian ini menjadi relevan sebagai bentuk perluasan studi kajian kolaboratif dalam hal keterlibatan multi aktor pada penerapan tata kelola perusahaan yang menekankan pada aspek keberlanjutan pada wilayah kawasan tambang dengan memperhatikan prinsip ESG. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan akademis pada kajian yang relevan di masa yang akan datang.

B. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan masukan konkret bagi Perusahaan, pemangku kepentingan dan masyarakat lokal terkait peran dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang sehat dan berkelanjutan pada kesetaraan aspek dan peran sehingga mengurangi risiko konflik, kemudian faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam kolaborasi dapat dijadikan sebagai referensi untuk melahirkan solusi dan strategi dalam meningkatkan partisipasi perusahaan dan pemberdayaan masyarakat terhadap isu sosial dan lingkungan yang adaptif sehingga memperkuat koordinasi semua pihak di lapangan. Penelitian ini dapat dijadikan juga sebagai referensi dalam pengembangan model kebijakan yang adaptif terhadap

keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam mendukung tata kelola perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

C. Manfaat Metodologis

Manfaat metodologis penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif terhadap dinamika *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan ESG di PT Vale Indonesia Tbk. Penelitian ini mengembangkan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan analisis dokumen berlandaskan kerangka *Collaborative Governance* dan prinsip ESG, sehingga dapat direplikasi pada penelitian sejenis. Penerapan triangulasi sumber dan metode juga meningkatkan validitas temuan, khususnya terkait faktor pendukung, penghambat, serta pola koordinasi antar-pemangku kepentingan. Selain itu, penggunaan analisis multi-level memberikan pendekatan yang sistematis dalam memahami interaksi aktor dan isu sosial–lingkungan pada korporasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi metodologis melalui penyusunan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengembangkan tata kelola kolaboratif pada konteks keberlanjutan perusahaan.

1.4. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berfungsi memberikan landasan konseptual dan akademik bagi penelitian ini. Melalui kajian pustaka, penulis menelaah teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *Collaborative Governance* dalam penerapan prinsip ESG. Fokus utama tinjauan ini adalah memahami dinamika tata kelola pemerintahan, kolaborasi antaraktor, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah perusahaan tambang.

1.4.1. Teori *Collaborative Governance*

Konsep *Collaborative Governance* berkembang sebagai jawaban atas keterbatasan model pemerintahan tradisional yang cenderung hierarkis dalam menangani persoalan kebijakan publik yang semakin kompleks dan melibatkan berbagai sektor (Higau et al. 2025). Pendekatan ini berfokus pada kolaborasi antara beragam pemangku kepentingan, meliputi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam suatu mekanisme kerja bersama untuk mewujudkan kepentingan publik. Gagasan ini mulai dikenal luas saat mengkaji bagaimana konsep *Collaborative Governance* sebagai suatu proses serta struktur pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor lintas lembaga secara kolektif (Ansell and Gash 2008).

Teori *Collaborative Governance* berangkat dari pandangan bahwa penyelesaian masalah publik yang kompleks, seperti isu lingkungan dan sosial dalam sektor pertambangan, tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu aktor tunggal, melainkan membutuhkan sinergi antar berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan tanggung jawab bersama (Bila and Saputra 2019). (Ansell and Gash 2008) mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai suatu proses dan struktur pengambilan keputusan serta manajemen kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor lintas batas kelembagaan secara kolektif. Dalam konteks pelaksanaan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di PT Vale Indonesia Tbk, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena aktivitas pertambangan nikel memiliki dampak langsung terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Permasalahan seperti degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, dan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap perusahaan menuntut adanya model tata kelola yang bersifat partisipatif, transparan, dan adaptif. Melalui *Collaborative Governance*, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dapat saling berbagi peran dan tanggung jawab untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan sosial. Kolaborasi yang berkelanjutan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koordinasi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran sosial yang memperkuat kepercayaan, komitmen bersama, serta inovasi dalam praktik pertambangan berkelanjutan.

Penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam sektor pertambangan sering kali dihadapkan pada tantangan struktural dan resistensi tata kelola (*governance resistance*), terutama ketika prinsip keberlanjutan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem manajemen perusahaan maupun kebijakan publik (Zaini, Aziz, and Wirawati 2025). Resistensi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, tumpang tindih regulasi, rendahnya transparansi perusahaan terhadap dampak lingkungan, hingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks PT Vale Indonesia Tbk, meskipun perusahaan telah berkomitmen pada penerapan ESG, potensi konflik sosial, degradasi lingkungan, serta kesenjangan manfaat ekonomi masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius (Razak et al. 2022). Hal ini menandakan bahwa implementasi ESG tidak hanya memerlukan kepatuhan prosedural, tetapi juga dukungan sistem tata kelola

yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan.

Teori *Collaborative Governance* menawarkan pendekatan yang menekankan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi resistensi tersebut. (Ansell and Gash 2008) menjelaskan bahwa kolaborasi efektif terbentuk melalui proses tatap muka (*face-to-face dialogue*), pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen bersama (*shared commitment*), dan pencapaian hasil bersama (*shared outcomes*). Dengan menerapkan prinsip ini, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dapat berperan secara seimbang: pemerintah memastikan regulasi dan pengawasan berjalan efektif, perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara transparan, sementara masyarakat turut terlibat dalam pengawasan dan pemanfaatan manfaat ekonomi secara adil. Dalam kerangka ini, *Collaborative Governance* berfungsi sebagai penghubung antara prinsip ESG dan praktik *good governance*, sehingga tercipta sistem tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

1.4.2. Konsep *Triple Helix*

Secara teoritis, Model *Triple Helix* pertama kali diperkenalkan oleh (Etzkowitz and Leydesdorff 1995) untuk menjelaskan bagaimana tiga aktor utama pemerintah (*government*), industri (*business/industry*), dan akademisi (*university*) berinteraksi dalam mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan. Ketiga aktor tersebut memiliki peran yang saling melengkapi: pemerintah sebagai regulator dan fasilitator kebijakan, industri sebagai penggerak ekonomi dan inovasi teknologi, serta universitas sebagai penghasil pengetahuan dan riset ilmiah (Irawan, Anggraini, and Purwono 2025). Interaksi

antara ketiganya melahirkan sistem inovasi yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, model ini telah diadaptasi menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, di mana masyarakat memainkan peran penting dalam memastikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan di tingkat lokal (Warsyena and Wibisono 2021).

Secara konseptual, *Triple Helix* berfungsi sebagai mekanisme koordinatif yang membantu menyelaraskan tiga dimensi utama ESG yakni *Environmental*, *Social*, dan *Governance* melalui pembagian peran yang jelas dan kolaboratif di antara aktor-aktor tersebut. Pertama, pemerintah berperan sebagai *policy enabler* dan pengawas keberlanjutan. Pemerintah menetapkan standar dan regulasi yang menjadi pedoman bagi industri dalam mengelola dampak lingkungan dan sosial, seperti penerapan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan kebijakan ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial di sektor pertambangan. Dalam kerangka ini, pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan ESG tidak hanya menjadi instrumen kepatuhan hukum, tetapi juga mendorong transformasi menuju tata kelola yang berkeadilan dan transparan (Operator 2014).

Kedua, industri (dalam hal ini PT Vale Indonesia Tbk) berperan sebagai *implementer* dan inovator kebijakan ESG. Melalui prinsip *environmental stewardship*, PT Vale menjalankan program pengelolaan lingkungan seperti rehabilitasi lahan pascatambang, efisiensi energi, dan konservasi air di wilayah Sorowako. Dari aspek sosial, perusahaan menerapkan program *Community Development and Empowerment (PPM)* yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar area

operasi (PT Vale Indonesia Tbk 2024). Sementara dari sisi *governance*, PT Vale mengimplementasikan sistem tata kelola yang transparan dengan mengadopsi *Global Reporting Initiative (GRI)* dan *SASB Metals & Mining Standards* untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan.

Ketiga, masyarakat berperan sebagai *co-creator* dalam proses pelaksanaan ESG. Mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat program, tetapi juga aktor aktif dalam proses konsultasi publik, musyawarah desa, dan evaluasi sosial. Dalam konteks ini, *Triple Helix* membuka ruang partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pemantauan kegiatan tambang agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Menurut (Rahman 2023) partisipasi multiaktor seperti ini memperluas basis inovasi sosial dan memperkuat legitimasi tata kelola di tingkat lokal.

Triple Helix membantu menyelaraskan pelaksanaan prinsip ESG melalui pembentukan sistem tata kelola kolaboratif di mana pemerintah memastikan kepastian hukum dan arah kebijakan, industri mengimplementasikan inovasi dan praktik berkelanjutan, serta masyarakat memberikan legitimasi sosial dan pengawasan moral. Pendekatan ini sejalan dengan *gagasan Collaborative Governance* (Ansell and Gash 2008), yang menekankan bahwa kebijakan publik yang kompleks seperti ESG hanya dapat berhasil jika dibangun di atas dasar kolaborasi, kepercayaan, dan dialog berkelanjutan antara semua pihak. Dalam konteks PT Vale Indonesia Tbk, penerapan *ss Helix* bukan hanya strategi tata kelola, melainkan juga paradigma pembangunan berkelanjutan yang menempatkan kolaborasi lintas-aktor sebagai fondasi utama keberhasilan pelaksanaan ESG (Gustanto 2025).

1.4.3. Konsep *Environmental, Social and Governance*.

Konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) merupakan kerangka yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan operasionalnya. ESG tidak hanya berfokus pada kinerja ekonomi perusahaan, tetapi juga pada dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, dan kualitas tata kelola yang dijalankan. Dalam konteks global, ESG telah menjadi instrumen penting untuk mengukur keberlanjutan dan integritas perusahaan. Menurut laporan keberlanjutan (PT Vale Indonesia Tbk 2024) perusahaan menyatakan bahwa penerapan prinsip ESG menjadi kunci dalam memastikan operasi pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Laporan tersebut menegaskan bahwa setiap keputusan bisnis PT Vale dipertimbangkan dengan cermat terhadap dampaknya pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan industri nasional.

Konsep ESG yang kemudian diterapkan oleh perusahaan sebagai kerangka kerja untuk mengukur keberlanjutan dan dampak etis dari aktivitas bisnis perusahaan menjadikan konsep ini berkembang seiring meningkatnya isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial terhadap kesadaran global pada aspek sosial dan lingkungan serta tata kelola perusahaan (Muhammad Fauzan Fachrezi et al. 2024). Konsep ESG memiliki tiga pilar utama yaitu (1) lingkungan (E) meliputi tanggung jawab perusahaan pada dampak ekologis diantaranya emisi karbon, efisiensi energi, konservasi air, dan pengelolaan limbah. (2) Sosial (S) pada pilar ini menggambarkan bagaimana hubungan perusahaan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk kesejahteraan

karyawan, kesetaraan, hak asasi manusia dan kontribusi sosial. Dan yang terakhir ialah (3) Tata Kelola (G) meliputi mekanisme kepemimpinan perusahaan, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan hukum serta metode pengambilan keputusan (Nawangsan and Saryanti 2025).

Konsep ESG dijadikan sebagai manajemen kinerja yang strategis dalam penciptaan nilai dan citra perusahaan dalam jangka panjang yang dapat membantu perusahaan memberikan keunggulan kompetitif melalui penguatan reputasi dan pengelolaan risiko yang efektif dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan bertanggung jawab (Kartika, Dermawan, and Hudaya 2023). Konsep ESG sejatinya menjadikan perusahaan tidak hanya terukur sebagai pencari keuntungan utama dari segi finansial tetapi perlu untuk terus memberikan kontribusi dan hak masyarakat sehingga konsep ESG tidak hanya bersifat normatif untuk kepentingan ekonomi semata tetapi menyatukan nilai etika dan keberlanjutan untuk menjaga daya tahan perusahaan terhadap ketidakpastian pasar global dan perubahan lingkungan yang signifikan (Minggu, Aboladaka, and Neonufa 2023).

Salah satu tantangan utama adalah memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi perusahaan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal yang sampai pada saat ini masih terus dilakukan proses perbaikan dan pembenahan. Studi dari Antara News Sultra (2023) mencatat bahwa praktik tambang nikel sering kali masih menghadapi stigma sebagai *“dirty nickel industry,”* sehingga perusahaan perlu menunjukkan transformasi nyata menuju praktik tambang bersih yang berbasis prinsip ESG (Antara News Sultra, 2023).

Penerapan ESG di PT Vale Indonesia Tbk mencerminkan proses dinamis menuju tata kelola pertambangan yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan. ESG menjadi bukan hanya instrumen evaluasi kinerja perusahaan, tetapi juga paradigma baru dalam membangun tata kelola kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Zaini, Aziz, and Wirawati 2025). Hal ini menjadi relevan dengan kerangka *Collaborative Governance* yang menjadi fokus penelitian, di mana keberhasilan penerapan ESG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan internal perusahaan, tetapi juga oleh kemampuan membangun sinergi dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, ESG dalam konteks PT Vale dapat dilihat sebagai representasi konkret dari upaya mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui kolaborasi lintas-sektor yang berkelanjutan (Vaniatan and Mukhtaruddin 2025).

1.4.4. Good Governance

Konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah kajian yang melihat bagaimana sistem pemerintahan diwujudkan dengan menekankan pada aspek efisien, adil serta bertanggung jawab (Ramadhan 2024). Konsep *Good Governance* menyusun sistem pemerintahan yang berdasar pada cakupan, proses dan institusi dimana masyarakat menyuarakan dan mengekspresikan hak dan kewajibannya serta berpendapat persoalan perbedaan-perbedaan yang mereka miliki sehingga konsep *good governance* bukan hanya semata pada tata kelola yang bersifat administratif tetapi mengedepankan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial (Marhadila et al. 2024). Perkembangan konsep *good governance* hari ini dinilai sebagai konsep yang terus bertransformasi dari segi aspek sosial

dan politik untuk membentuk birokrasi dengan sistem tata kelola yang memiliki integritas dan legitimasi yang kuat dalam meningkatkan kepercayaan publik melalui nilai demokratis (Sri Rahmawati and Dhea Nowanda 2025).

Good governance ditempatkan sebagai elemen integral dari pendekatan *New Public Management* (NPM), yang memprioritaskan aspek efisiensi, efektivitas, serta layanan publik yang berfokus pada kepuasan pelanggan dengan dasar pencapaian kinerja (*performance-based*), transparansi, dan persaingan dalam pemberian layanan (Nurdin 2019). Sementara itu, dalam studi governance, teori kelembagaan (*institutionalism*) turut memberikan peran krusial. Teori tersebut menyoroti bahwa mutu tata kelola sangat bergantung pada rancangan institusi, regulasi yang mengatur, serta norma-norma sosial yang dominan (Rahmawati and Tjenreng 2025). Oleh karena itu, realisasi *good governance* akan menghadapi kendala besar jika institusi negara tidak dibangun untuk memperkuat akuntabilitas dan integritas, atau apabila budaya birokrasi masih bersifat feodal dan patrimonial. Pada kerangka demokrasi deliberatif, *good governance* dipandang sebagai proses yang menitikberatkan pada komunikasi yang rasional, partisipasi masyarakat dalam diskusi, serta pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak secara inklusif (Kersting 2021).

Good governance menurut (United National Development Program 1997) pada dasarnya menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan, dalam pelaksanaannya merupakan suatu proses penyelenggaraan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks sektor

pertambahan, penerapan *good governance* menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa kebijakan perusahaan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial dan kelestarian lingkungan (Efisiensi and Good 2025). Implementasi dari prinsip *good governance* pada dasarnya mengedepankan kolaborasi antaraktor dalam hal ini pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan keberlanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip *good governance*, pelaksanaan ESG di PT Vale Indonesia Tbk diharapkan tidak bersifat simbolis, melainkan menjadi sistem tata kelola yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) oleh PT Vale Indonesia Tbk menunjukkan upaya nyata perusahaan dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam tata kelola korporasi (Sari 2025). Namun, dalam perspektif *teori good governance*, masih terdapat sejumlah tantangan yang menunjukkan perlunya penguatan sistem tata kelola agar nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dapat terwujud secara menyeluruh. Berdasarkan laporan keberlanjutan (PT Vale Indonesia Tbk 2024), perusahaan memperoleh skor risiko ESG sebesar 29,4 dari *Sustainalytics* dan dikategorikan sebagai risiko menengah menandakan bahwa penerapan prinsip ESG masih perlu untuk terus dikaji terkhusus pada bagaimana keberdampakan dan keberlanjutannya dalam kehidupan sosial.

Jika dianalisis melalui teori *good governance* (World Bank 1997) kondisi ini menggambarkan bahwa PT Vale telah

mengadopsi struktur formal tata kelola yang memadai, tetapi perlu memperkuat aspek *participatory governance* agar pelaksanaan ESG benar-benar inklusif. Prinsip *transparency* dan *accountability* dapat dipertajam melalui publikasi yang lebih terbuka tentang capaian dan hambatan keberlanjutan, serta pelibatan masyarakat sipil dalam forum konsultasi publik (Subagio 2019). Selain itu, peran pemerintah daerah sebagai *regulator* dan *mediator* juga menjadi penting untuk memastikan implementasi ESG berjalan sesuai prinsip keadilan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, maka penerapan *good governance* dalam ESG bukan hanya menjadi komitmen normatif, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasi PT Vale Indonesia Tbk (Pratama and Kurniati 2025).

1.5. Kerangka Pikir

Penerapan *Collaborative governance* dalam pelaksanaan ESG di PT Vale Indonesia Tbk menjadi salah satu bukti bahwa kolaborasi antar aktor dalam menjaga tata kelola perusahaan dan menjaga reputasi perusahaan adalah kunci dari tercapainya tujuan utama perusahaan. Pelaksanaan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di PT Vale Indonesia Tbk memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan serta kebijakan publik yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Ramadhan 2024). Dalam konteks ini, teori Good Governance menjadi dasar normatif yang menegaskan pentingnya praktik tata kelola yang beretika, terbuka, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat luas. Nilai-nilai tersebut menjadi

pedoman dalam pelaksanaan setiap komponen ESG, terutama dalam pengelolaan aspek lingkungan dan sosial yang menuntut komitmen terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan publik.

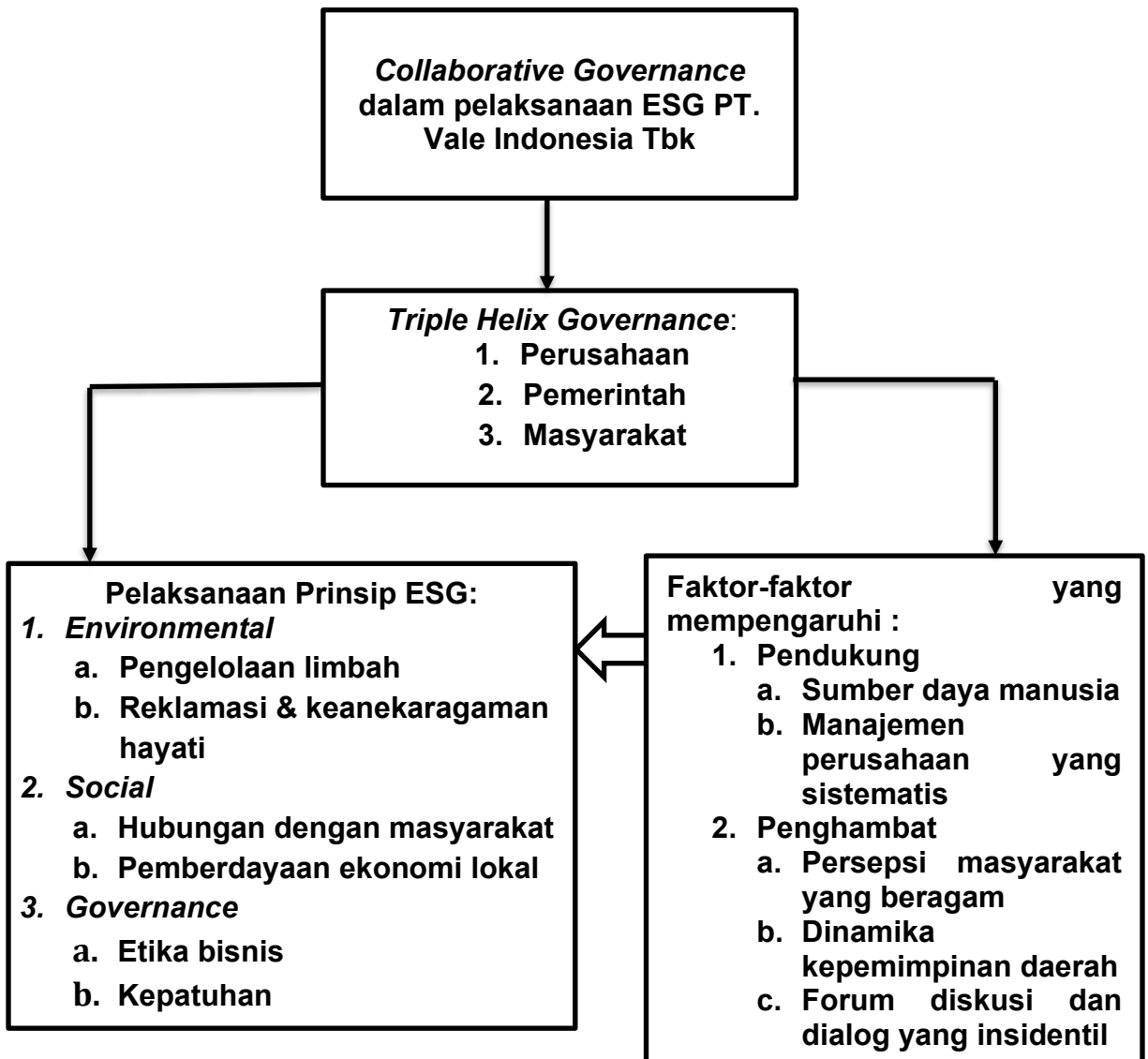
Lebih lanjut, teori *Collaborative Governance* (Ansell and Gash 2008) memberikan kerangka analisis yang menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip *Good Governance* dapat diwujudkan secara nyata melalui kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini menekankan pentingnya partisipasi dan koordinasi lintas sektor dalam proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan ESG (Ulfa, Harjanti, and Wijayanti 2025). Dengan adanya kolaborasi yang efektif, implementasi program ESG di PT Vale diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang inklusif dan adil, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, keterpaduan antara prinsip *Collaborative Governance*, yang diselaraskan dalam kajian *Triple Helix* (Etzkowitz and Leydesdorff 1995) melalui keterlibatan Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat dalam pelaksanaan konsep ESG untuk mewujudkan dinamika pertambangan dengan asas keberlanjutan dan kebermanfaatannya senantiasa sejalan dengan prinsip *Good Governance*, sehingga menguatkan perusahaan dalam menjalankan tata kelola perusahaannya, membantu pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau dan kesejahteraan masyarakat lingkaran tambang yang terjamin pada bagaimana PT Vale Indonesia Tbk mengimplementasikan ESG secara transparan, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Berdasarkan kerangka teori tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pokok rumusan masalah:

- a. Bagaimana penerapan *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan *Environmental, Social and Governance* PT. Vale Indonesia Tbk.
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan *Environmental, Social and Governance* PT. Vale Indonesia Tbk.

Kerangka pikir ini menuntun penulis untuk menganalisis praktik kolaborasi yang terjadi di lapangan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tata kelola, serta memahami dinamika faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kolaborasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan, sekaligus kontribusi praktis dalam perbaikan tata kelola industri pertambangan di daerah.



Gambar 1.1. Kerangka Konseptual

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian merupakan sebuah lokasi yang telah ditentukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Lokasi penelitian skripsi ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur di Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha sebagai wilayah operasional pabrik PT Vale Indonesia Tbk, dan Kecamatan Towuti sebagai wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia Tbk. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama satu bulan.

2.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses kolaborasi antaraktor dalam pelaksanaan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di PT Vale Indonesia Tbk, serta mengungkap makna di balik interaksi sosial dan kebijakan yang terbangun di antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Menurut (2024 n.d.), pendekatan kualitatif digunakan untuk menelusuri fenomena sosial dan makna yang diinterpretasikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu persoalan. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman konteks, pengalaman, serta dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui angka atau statistik. Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk menelusuri bagaimana prinsip *Collaborative Governance* diterapkan dalam praktik pelaksanaan ESG.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu atau bidang tertentu. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk

menjelaskan hubungan antaraktor dalam proses kolaborasi, memahami mekanisme tata kelola kolaboratif, serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi ESG di lapangan.

Pemilihan pendekatan ini juga didasarkan pada asumsi bahwa fenomena tata kelola kolaboratif tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu dipahami secara kontekstual dan interpretatif melalui data empiris dari pengalaman langsung para pelaku di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika implementasi *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan ESG pada PT Vale Indonesia Tbk. di Kabupaten Luwu Timur.

2.3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait fenomena yang sedang diteliti, sehingga dapat memberikan data yang beragam dan mendalam. Dalam penelitian skripsi ini terdapat 10 informan, adapun informan penelitian terdiri atas:

1. Staf Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kab.Luwu Timur.
2. Perencana Ahli Muda Baperinda Kab.Luwu Timur (2 orang).
3. Pengawas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur.
4. *Supervisor Enviro Operation Departemen HSSER (Heal,Safety,Sustainability,Environmental and Risk).*
5. Kontraktor PT Vale, Penanggung jawab operasional (PJO)/*Site Manager* (PT. Uwais Mandiri Utama)
6. Fasilitator Desa PT.COMMIT, Konsultan PT.Vale Indonesia Program Pemberdayaan Masyarakat.

7. Tokoh Adat Padoe Kecamatan Towuti.
8. Ketua Komunitas *Spear Fishing* Sorowako.
9. Ketua HIPHO (Himpunan Penggiat Herbal Organik) Sorowako.

2.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua sumber data ini digunakan secara komplementer untuk memperoleh gambaran atas data yang ditemukan secara utuh mengenai penerapan *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di PT Vale Indonesia Tbk.

2.4.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui hasil wawancara, observasi, dan interaksi dengan para informan penelitian. Data ini mencerminkan pengalaman, pandangan, serta persepsi para aktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan ESG dan kegiatan kolaboratif di PT. Vale Indonesia Tbk.

2.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis maupun dokumentasi resmi yang mendukung analisis penelitian. Data ini digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Pada penelitian ini sumber data sekunder ialah Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur terkait TJSL, RKPD Tahun 2026 dan RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029, Dokumen internal Dinas Lingkungan Hidup, Dokumentasi Kegiatan OPD terkait, Kebijakan ESG PT.Vale, Laporan Keberlanjutan PT.Vale, Web resmi PT.Vale, jurnal dan artikel terkait *Collaborative Governance*

dan pelaksanaan ESG, serta berita melalui media informasi yang membantu penulis untuk membuktikan hasil penelitian secara faktual untuk dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penelitian.

2.5. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan inti perhatian atau sasaran utama yang diteliti, sehingga segala upaya pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan diarahkan pada hal tersebut. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada aspek

2.5.1. Penerapan *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan *Environmental, Social and Governance (ESG)* PT. Vale Indonesia Tbk.

1. Environmental

- a. Pengelolaan limbah adalah proses perencanaan, pengurangan, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan limbah secara bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan .
- b. Reklamasi & keanekaragaman hayati adalah upaya pemulihan dan penataan kembali lahan tambang agar dapat berfungsi secara ekologis, sosial, dan ekonomi, sekaligus menjaga, melindungi, dan meningkatkan keberagaman hayati serta keseimbangan ekosistem.

2. Social

- a. Hubungan dengan masyarakat adalah upaya perusahaan membangun hubungan yang positif, etis, dan berkelanjutan dengan masyarakat sekitar melalui dialog, keterlibatan sosial, serta pengelolaan dampak sosial dari aktivitas bisnis.

- b. Pemberdayaan ekonomi lokal adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

3. *Governance*

- a. Etika bisnis adalah Prinsip dan nilai yang mengarahkan perusahaan untuk menjalankan usaha secara jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.
- b. Kepatuhan adalah Komitmen perusahaan untuk mematuhi seluruh hukum, peraturan, dan standar yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnis.

2.5.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Environmental, Social and Governance (ESG)* PT. Vale Indonesia Tbk antara lain :

1. Faktor Pendukung adalah segala hal yang mendukung dan membantu dalam pelaksanaan ESG PT Vale Indonesia Tbk.
2. Faktor Penghambat adalah segala hal yang dapat mengganggu aktivitas pelaksanaan ESG PT Vale Indonesia Tbk.

2.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui informasi yang didapatkan secara terencana dan sistematis sebagai upaya untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

2.6.1. Observasi Langsung

Pada penelitian ini pengamatan dilakukan secara langsung pada aspek pelaksanaan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* di PT Vale Indonesia Tbk, peneliti hadir di lokasi penelitian untuk mengamati dan mencatat kegiatan secara langsung.

2.6.2. Wawancara Mendalam

Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur dengan para informan yang telah ditentukan guna mendapatkan data lapangan untuk menjawab permasalahan dan mencari tahu peran tiap unsur *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan ESG PT.Vale Indonesia Tbk.

2.6.3. Studi Dokumentasi

Mengumpulkan berbagai dokumen pendukung sebagai landasan empiris untuk memperkuat hasil penelitian yang didapatkan melalui observasi dan wawancara sesuai dengan fokus penelitian.

2.7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari (Miles dan huberman, saldana 2014 n.d.). Model ini dipilih sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang bersifat dinamis, interaktif, dan berlangsung secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.

(Miles dan huberman, saldana 2014 n.d.), proses analisis data kualitatif terdiri atas empat tahapan utama, yaitu:

2.7.1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap pertama dalam analisis data ini ialah pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, kemudian wawancara mendalam bersama para informan untuk mendapatkan informasi terkait dengan tujuan penelitian yang didasarkan pada teknik *purposive sampling* dimana informan ditentukan berdasarkan peran serta keterlibatan dan pengetahuan terkait topik penelitian yaitu penerapan *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan ESG PT.Vale, dan studi dokumentasi sebagai teknik memperkaya data dari temuan observasi dan wawancara. Pada pengumpulan data ini kemudian peran pemerintah, perusahaan dan masyarakat

dapat menggarban konsep *Collaborative Governance* di aspek keberlanjutan sektor pertambangan secara menyeluruh.

2.7.2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan dengan cara memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang dianggap tidak relevan atau berulang dieliminasi, sementara informasi penting dikategorikan ke dalam subtema *Environmental, Social, and Governance*. Proses reduksi ini bertujuan agar data lebih mudah diinterpretasikan dan dianalisis secara mendalam.

Pada penelitian ini data di reduksi secara berkelanjutan dimulai dari tahap pertama pengumpulan data hingga seluruh proses analisis selesai. Analisis dalam reduksi data ini dilakukan dengan memilah dan menyeleksi data yang relevan sesuai fokus penelitian yaitu penerapan *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan ESG PT.Vale Indonesia TBK. Setiap data yang didapatkan melalui wawancara berupa transkrip wawancara, catatan observasi dan dokumen dikelompokkan dan dianalisis sesuai dengan topik dan substansi penelitian yang saling terkait.

Tahapan ini menjadikan peneliti lebih mudah mengidentifikasi substansi penelitian berdasarkan hubungan dari tiap fokus penelitian secara jelas dengan menyusun ringkasan data yang ditemukan. Dengan demikian hasil data yang dipilih dapat diolah secara lebih terstruktur dan sistematis sesuai dengan klasifikasi data yang telah dikelompokkan.

2.7.3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif yang disusun

secara sistematis kemudian dianalisis berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Tahapan ini bertujuan tidak hanya menggambarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan, tetapi juga untuk memberikan penafsiran dan analisis yang mendalam terhadap makna data tersebut dalam kaitannya dengan konsep *Collaborative Governance* dan pelaksanaan prinsip ESG di PT Vale Indonesia TBK. Data yang disajikan bersumber dari hasil wawancara dengan informan penelitian, observasi lapangan, serta dokumentasi pendukung, yang kemudian diorganisasikan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

Dalam penyajian data, peneliti mengelompokkan temuan penelitian ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan dimensi *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan ESG. Setiap tema disajikan secara deskriptif dengan memaparkan kondisi aktual di lapangan, disertai kutipan hasil wawancara dan temuan observasi yang representatif. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara analitis dengan mengaitkannya pada teori *Collaborative Governance* untuk menilai sejauh mana praktik kolaborasi yang dilakukan oleh PT Vale telah memenuhi prinsip-prinsip kolaboratif yang ideal.

Melalui penyajian data secara deskriptif analitis, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu penyajian data tidak hanya berfungsi sebagai media untuk menampilkan hasil penelitian, tetapi juga sebagai dasar analisis yang memungkinkan peneliti memahami hubungan antaraktor, dinamika kolaborasi, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan ESG di PT Vale Indonesia TBK. Dengan demikian, penyajian data secara deskriptif analitis menjadi tahap penting

dalam menjembatani data empiris dengan analisis teoritis, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

2.7.4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data penelitian, yang bertujuan untuk merumuskan makna dari data yang telah direduksi dan disajikan secara sistematis. Menurut Miles dan Huberman dalam (Razak et al. 2022), penarikan kesimpulan adalah proses interpretasi terhadap pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat final sejak awal, melainkan berkembang secara bertahap selama proses penelitian berlangsung dan senantiasa diverifikasi melalui pengumpulan data tambahan serta pengecekan ulang terhadap temuan penelitian.

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengkaji secara mendalam temuan-temuan empiris terkait *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan ESG PT. Vale Indonesia Tbk, kemudian mengaitkannya dengan kerangka teori yang digunakan. Proses ini melibatkan penafsiran terhadap dinamika kolaborasi antara PT. Vale Indonesia TBK dan para pemangku kepentingan, termasuk pola komunikasi, tingkat partisipasi, mekanisme pengambilan keputusan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan ESG. Dengan demikian, penarikan kesimpulan tidak hanya berfungsi untuk merangkum hasil penelitian, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan analitis mengenai fenomena

yang diteliti, sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar empiris yang kuat dan relevan secara teoritis. Kesimpulan akhir menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan ESG PT.Vale Indonesia TBK telah mencerminkan penerapannya secara regulasi dan dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri ditemukan dinamika diantaranya faktor pendukung dan faktor penghambat dari interaksi tiga aktor yang sangat penting didalam mendukung dan mencapai tujuan perusahaan dan material kerangka kebijakan PT.Vale Indonesia TBK.